

## EVALUASI KEBIJAKAN KEAHLIAN GANDA GURU ALIH FUNGSI PERHOTELAN DI SMK KELOMPOK PARIWISATA JAWA TENGAH

Vera Ira Maya Rohi<sup>1</sup>, Muhammad Sayuti<sup>2</sup>, Tri Kuat<sup>3</sup>, Fitri Nur Mahmudah<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Kapas No.9, Yogyakarta, Indonesia

Email: [fitri.mahmudah@mpgv.uad.ac.id](mailto:fitri.mahmudah@mpgv.uad.ac.id)

---

### Article History

Received: 07-10-2023

Revision: 12-10-2023

Accepted: 14-10-2023

Published: 15-10-2023

**Abstract.** This study aims to analyze government policies on dual skill transfer of teacher functions from the perspective of effectiveness, efficiency, adequacy, structuring, responsiveness, and accuracy, analyzing teacher attitudes towards teacher dual skill transfer policies. This research is a qualitative public policy and descriptive research. Data collection techniques with interviews, observation, and documentation. The respondents in this study were school principals, vocational school supervisors, Widyaiswara, PTK lecturers, heads of expertise competencies, dual skilled participant teachers, dual skilled participant companions, dual skill instructors and Hospitality and Tourism experts. Data validation using source triangulation. Data analysis techniques use qualitative data analysis techniques. The results showed that the results achieved have focused on upskilling, re-skilling, and lifelong learning for teachers, efficiently producing teachers who have competence in hospitality expertise competencies, the adequacy of the results of the dual skill program for teacher function transfer has not been fully realized. The policy strength is very high because it is the government's response to vocational education and job skills education and training with Presidential Instruction Number 9 of 2016 concerning the Revitalization of Vocational Schools. The most substantive weakness of this program is the lack of certainty of IDUKA internships and the fulfillment of the number of vocational hospitality specialization teachers who lack specialization teachers.

**Keywords:** Dual Expertise, Dual Competencies, Master of Hospitality

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang keahlian ganda alih fungsi guru dari perspektif efektifitas, efisiensi, kecukupan, penataan, responsivitas, dan ketepatan, menganalisis sikap guru terhadap kebijakan keahlian ganda alih fungsi guru. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan publik dan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, pengawas SMK, Widyaiswara, Dosen PTK, ketua kompetensi keahlian, guru peserta keahlian ganda, pendamping peserta keahlian ganda, instruktur keahlian ganda dan tenaga ahli Perhotelan dan Pariwisata. Validasi data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil yang dicapai telah berfokus pada peningkatan keterampilan (upskilling), keterampilan ulang (re-skilling) dan pembelajaran seumur hidup bagi guru, efisien menghasilkan guru yang memiliki kompetensi pada kompetensi keahlian perhotelan, kecukupan capaian hasil program keahlian ganda alih fungsi guru memang belum terealisasi seluruhnya. Kekuatan kebijakan sangat tinggi karena merupakan respon pemerintah terhadap pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Kelemahan program ini yang paling substantif belum adanya kepastian magang IDUKA dan pemenuhan jumlah guru peminatan Perhotelan SMK yang kekurangan guru peminatan.

**Kata Kunci:** Keahlian Ganda, Dual Kompetensi, Guru Perhotelan

---

**How to Cite:** Rohi, V. I. M., Sayuti, M., Kuat, T., & Mahmudah, F. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Keahlian Ganda Guru Alih Fungsi Perhotelan di SMK Kelompok Pariwisata Jawa Tengah. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4 (2), 1132-1137. <http://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.332>.

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan vokasi di Indonesia oleh pemerintah dinilai sebagai jalur untuk meningkatkan daya saing bangsa sehingga banyak tenaga terdidik dan terampil sesuai bidang keahlian yang dapat berkompetisi di era pasar global. Billet (2011) mengungkapkan bahwa pendidikan vokasi dalam arti luas terkait dengan mengembangkan dan mempertahankan kapasitas individu yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Ini berarti karier yang dialami pada pendidikan vokasi harus memiliki relevansi dengan bidang pekerjaan yang dipilih. Dalil ke-3 Prosser (1949) menguraikan realita bahwa pendidikan kejuruan akan efektif secara proposional karena melatih individu secara langsung dan khusus dalam kebiasaan berpikir dan kebiasaan manipulatif yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Dua pendapat di atas menegaskan posisi penting pendidikan kejuruan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 15 menyatakan bahwa SMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Hal ini mengungkapkan bahwa posisi pendidikan kejuruan di Indonesia sangat penting untuk menghasilkan tamatan yang kompeten untuk dapat bekerja di bidang tertentu sesuai dengan bidang keahlian vokasi yang dipilihnya. Muchlas (2019) mengatakan bahwa guru yang tidak mau belajar, tidak boleh mengajar. Hal ini berarti pembelajaran sepanjang hayat harus benar-benar terpatri menjadi panggilan jiwa dan diimplementasikan setiap guru dalam membantu meningkatkan kualitas peserta didik sebelum memasuki sekolah kehidupan.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat sangat diuntungkan dari hal ini, karena akan membuka kerjasama internasional untuk pelatihan guru. Keseriusan pemerintah terhadap pendidikan vokasi sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia berdampak pada kebutuhan guru yang kompeten sesuai bidang keahlian untuk penyiapan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing terutama dalam pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tengah berjalan (Hartanto, 2019). Peningkatan kompetensi guru di Indonesia masih merupakan masalah berat yang membutuhkan solusi. Revitalisasi pendidikan kejuruan di Indonesia tidak maksimal jika tidak dibarengi dengan ketersediaan guru kejuruan yang cukup dan kompeten (Arie Wibowo Khurniawan, 2019). Tantangan pendidikan vokasi di Indonesia dilihat dari perspektif kualitas guru yang pertama adalah belum semua guru memiliki latar belakang pendidikan sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Guru dan Dosen (Undang-Undang, 2014).

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1591 SMK laporan tahun 2016 menunjukkan bahwa masih ada 56% guru yang tidak linear antara pendidikan yang diperoleh selama

menempuh pendidikan S-1 dengan apa yang diajarkan di kelas (Kompas, 2018). Contoh lain di sekolah peneliti sendiri menunjukkan bahwa di Kompetensi Keahlian (KK) Perhotelan, masih ada empat dari tujuh guru yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai. Fenomena di Status guru SMK antara Guru PNS dan Non PNS terutama sangat kelihatan adalah di lingkungan SMK Negeri. Kesenjangan antara Guru PNS dan Guru Tidak Tetap (GTT) non PNS. Hal ini disebabkan setiap guru yang akan mengikuti Pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah mensyaratkan guru memiliki NUPTK atau pernah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kebijakan publik dan deskriptif kualitatif jenis penelitian evaluasi kebijakan. Riant Nugroho (2008) menyatakan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan. Sejalan dengan itu Noeng (2004) menegaskan *public policy* yaitu kebijakan yang dirumuskan oleh atasan dengan melihat rata-rata kebutuhan masyarakat. Burhan (2005) mengemukakan bahwa unsur utama rancangan penelitian mencakup pada konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup dan tempat penelitian, perspektif teoretis dan kajian pustaka, serta metode yang digunakan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, pengawas SMK, Widyaiswara, Dosen PTK, ketua kompetensi keahlian, guru peserta keahlian ganda, pendamping peserta keahlian ganda, instruktur keahlian ganda dan tenaga ahli Perhotelan dan Pariwisata. Validasi data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni. Guru sebagai tenaga professional memiliki fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2025

yaitu menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Dengan demikian Pendidikan dan pelatihan terus menerus harus diikuti dan dilaksanakan oleh guru.

Profesi guru harus dikembangkan secara kontinu, dikelola dan dikembangkan semaksimal mungkin secara bijaksana dan bermartabat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pengembangan profesi guru melalui Pendidikan untuk menjawab tantangan pemelajaran abad 21 yang semakin kompleks serta bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan kariernya secara profesional. Kebijakan Program sertifikasi keahlian dan Sertifikasi pendidik Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMK/SMA memiliki preferensi dan nilai-nilai tertentu dilihat dari sudut pandang industri dan dunia kerja (IDUKA). Namun disisi lain guru peserta program sertifikasi keahlian dan Sertifikasi pendidik Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMK/SMA Kompetensi Keahlian Perhotelan juga di tuntut untuk senantiasa memperbaharui sikap, pengetahuan dan keterampilan sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan peserta didik terhadap kemampuan seorang guru. Untuk dapat meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan bidang perhotelan dan pariwisata, diharapkan guru yang telah mendapatkan pengakuan kompetensi keahlian ganda dapat melaksanakan kegiatan magang selama 6 bulan layaknya seorang peserta didik bukan hanya observasi sesaat untuk menjamin kompetensi yang dimiliki senantiasa terbaru, terkini dan relevan dengan IDUKA.

Ketepatan capaian Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMK/SMA bukanlah tanpa kendala karena sangat mendesak untuk memenuhi kekurangan guru peminatan perhotelan. Namun perlu dilakukan perbaikan terus menerus agar program yang dilaksanakan sesuai dengan yang ingin dicapai. Menurut Hailikari et Al. (2007), penelitian menunjukkan bahwa kompetensi awal pada bidang tertentu secara khusus memengaruhi prestasi individu. Sekitar 95% dari semua studi berfokus pada kompetensi awal menunjukkan pengaruh yang positif. Pendidikan tidak dapat menutupi kekurangan di domain kebijakan lain yang menyebabkannya dan terus menyebabkan pengangguran. Pendidikan adalah bagian penting dari kebijakan apa pun campuran, dan itu membutuhkan lembaga dan sistem pendidikan yang dipelihara dengan baik dan bersumber daya, keterampilan abad 21 serta kredensial mikro yang diipromosikan untuk mencapai pertumbuhan lapangan kerja dapat menjadi gangguan dari prasyarat utama untuk sukses sistem pendidikan.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan keahlian ganda alih fungsi guru dari perspektif efektifitas bahwa hasil yang dicapai telah berfokus pada peningkatan keterampilan (*upskilling*), keterampilan ulang (*re-*

skilling) dan pemelajaran seumur hidup bagi guru pendidikan kejuruan khususnya Kompetensi Keahlian Perhotelan di Jawa Tengah. Program ini termasuk efektif dengan memberdayakan guru yang kekurangan jam mengajar untuk dapat memiliki kompetensi baru tanpa harus merencanakan dan melaksanakan perekrutan guru baru, efisien menghasilkan guru yang memiliki kompetensi pada kompetensi keahlian perhotelan yakni guru peminatan perhotelan di Jawa Tengah akan terpenuhi dalam waktu yang relatif lebih cepat, dari perspektif kecukupan capaian hasil program keahlian ganda alih fungsi guru memang belum terealisasi seluruhnya jumlah peserta keahlian ganda peminatan Perhotelan Provinsi Jawa Tengah batch 1 sebanyak 61 peserta dan batch 2 sebanyak 20 peserta, dari perspektif perataan capaian hasil program keahlian ganda alih fungsi guru memang belum terealisasi karena belum adanya regulasi pendistribusian sebaran guru keahlian ganda alih fungsi guru peminatan Perhotelan di Jawa Tengah, perspektif responsivitas disambut dengan pro dan kontra, perspektif ketepatan program alih fungsi keahlian ganda guru secara umum tepat dilakukan hal ini terkait dengan karier guru meskipun dalam pelaksanaan di lapangan masih dijumpai permasalahan dan keluhan dari pendamping, instruktur dan peserta keahlian ganda. Setelah batch 1 dan batch 2. Kekuatan dan kelemahan kebijakan keahlian ganda alih fungsi guru dari perspektif pemangku kepentingan di SMK Kelompok Pariwisata bahwa kekuatan Kebijakan Keahlian Ganda Alih Fungsi Guru sangat tinggi karena merupakan respon pemerintah terhadap pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia

## REFERENSI

- Noeng, Muhadjir. (2004). *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research Integrasi Penelitian Kebijakan dan Perencanaan*. Rake Sarasin, Yogyakarta.
- OECD/Asian Development Bank (2015), *Education in Indonesia: Rising to the Challenge*, OECD Publishing, Paris.
- Pavlova, M. (2009). *Technology and vocational education for sustainable development: Empowering individuals for the future*. Australia: Springer.
- Phin, C. (2014). *Teacher competence and teacher quality in Cambodias educational context linked to in-service teacher training: an examination based on a questionnaire survey*. *International Journal of Educational Administration and Policy Studies*, 6(4), 62–69. <https://doi.org/10.5897/IJEAPS2013.0326>
- Salkind, N. J. (2015). *Teori-teori perkembangan manusia: Sejarah kemunculan, konsepsi dasar, analisis komparatif, dan aplikasi*. Bandung: Nusa Media.

- Santrock, J. W. (2012). *Life-span development: Perkembangan masa hidup edisi ketigabelas jilid 2*. New York: Erlangga.
- Sary, Y. N. E. (2015). *Psikologi pendidikan*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Schripsema, N. R., & Trigt, A. M. Van. (2017). Impact of vocational interests, previous academic experience, gender and age on Situational Judgement Test performance. *Advances in Health Sciences Education*, 22(2), 521–532. <https://doi.org/10.1007/s10459-016-9747-9>
- Shanmugam, L. (2016). A study on differential aptitude and teaching competency of student teachers in Kancheepuram district. *Journal of Education and Practice*, 7(13), 87–88.
- Steve Ketteridge, Stephanie Marshall. (1999), *A handbook for teaching and learning in higher education: enhancing academic practice*, Routledge 270 Madison Ave, New York.
- Taub, M., Azevedo, R., Bouchet, F., & Khosravifar, B. (2014). Can the use of cognitive and metacognitive self-regulated learning strategies be predicted by learners' levels of prior knowledge in hypermedia-learning environments? *Computers in Human Behavior*, 39, 356–367. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.07.018>
- Thompson, John F. (1973) *Foundations of Vocational Education*. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey
- Uno, H. B. (2014). *Profesi kependidikan: Problema, solusi, dan reformasi pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wetzels, S. A. J., Kester, L., & Van Merriënboer, J. J. G. (2011). Adapting prior knowledge activation: Mobilisation, perspective taking, and learners' prior knowledge. *Computers in Human Behavior*, 27(1), 16–21. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.05.004>
- Williams, J. J., & Lombrozo, T. (2013). Explanation and prior knowledge interact to guide learning. *Cognitive Psychology*, 66(1), 55–84. <https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2012.09.002>
- Xiaofeng, M., Xiao-e, Y., Yanru, L., & AiBao, Z. (2016). Prior knowledge level dissociates effects of retrieval practice and elaboration. *Learning and Individual Differences*, 51, 210–214. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.09.012>
- Zhang, L. (2010). Do age and gender make a difference in the relationship between intellectual styles and abilities? 87–103. <https://doi.org/10.1007/s10212-0090006-9>